



Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban  
Tindak Kekerasan  
*The Federations of The Commission for the  
Disappeared and the Victims of Violence*

## Press Release

Untuk segera disiarkan

### **Aparat Kepolisian di Jayapura telah memasuki Kantor KontraS Papua dan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang yang melanggar hukum**

Sekretariat Federasi KontraS mendapatkan laporan dari Jayapura, Papua bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 sejumlah aparat keamanan telah memasuki kantor KontraS Papua di Jayapura, menyita sejumlah barang dan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang kepada sejumlah aktivis dan pegiat HAM.

Staff KontraS Papua melaporkan, saat itu sekira pukul 13.30 WIT sejumlah aparat keamanan datang menuju ke kantor KontraS Papua dengan mengendarai beberapa unit mobil. Sebagian diantara aparat memasuki kantor secara paksa, dan puluhan yang lain berjaga di sepanjang jalan di depan kantor. Para petugas keamanan tersebut berpakaian preman, dan beberapa diantaranya membawa senjata laras panjang.

Selanjutnya mereka melakukan menggeledah kantor, menangkap para aktivis yang sedang berkumpul di dalam kantor. Para petugas keamanan tersebut mengambil dan menyita sejumlah peralatan kantor yaitu, satu unit CPU, laptop, printer, handy talk, dan sejumlah buku.

Dalam keterangannya, Polisi mendatangi kantor KontraS Papua dan menangkap sejumlah aktivis yang ada disana dengan alasan untuk menangkap penanggung jawab aksi demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua pada Selasa (10/5/2022), di mana demonstrasi tersebut berujung rusuh karena Polisi membubarkan secara paksa aksi demonstrasi. Polisi berasalan aksi demonstrasi ini tidak mengantongi izin dari Kepolisian.

Sejumlah tujuh orang aktivis yang ditangkap Polisi saat berada di kantor KontraS adalah :

1. Jefry Wenda
2. Ones Suhuniap
3. Omikzon Balingga
4. Max Mangga
5. Ester Haluk
6. Iman Kogoya
7. Abbi Douw

Melalui keterangan pers ini, kami mengutuk keras tindakan brutal polisi yang telah membubarkan secara paksa aksi demonstrasi damai menolak daerah otonomi baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua pada Selasa (10/5/2022) dan kami juga mengutuk

**Truth and Justice for Humanity**



Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban  
Tindak Kekerasan

*The Federations of The Commission for the  
Disappeared and the Victims of Violence*

sangat keras atas tindak sewenang-wenang Polisi yang dengan melanggar hukum telah memasuki kantor KontraS Papua untuk melakukan penyitaan barang dan penangkapan orang secara sewenang-wenang.

Tidak ada aturan hukum yang dapat membenarkan tindakan Kepolisian tersebut.

Kantor KontraS Papua, adalah kantor lembaga masyarakat yang meneguhkan prinsip non kekerasan dan HAM, serta menjadi tempat menagdu bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Karena itu tidak selayaknya Kepolisian justru bersikap arogan, melanggar hukum dan mengabaikan HAM.

Karena itu, kami KontraS Papua dan Federasi KontraS menuntut :

1. Kepolisian membebaskan tanpa syarat semua orang yang ditahan
2. Kepolisian membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil seluruh kerusakan yang diakibatkan tindakan personilnya yang secara sewenang-wenang memasuki kantor KontraS Papua dan menangkap orang secara sewenang-wenang dan melanggar hukum
3. Kapolri melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepolisian Daerah Papua, dengan memeriksa dan menghukum para pejabat polisi.
4. Kepolisian harus memastikan semua kantor-kantor lembaga masyarakat yang berkomitmen terhadap HAM adalah zona aman bagi korban dan pegiat HAM.

**Jakarta, 11 Mei 2022**

**Andy Irfan, SH (Sekjen Federasi KontraS)**

Kontak : 081233096022

**Samuel Awom (Koordinator KontraS Papua)**

Kontak : 0821 9805 2223

**Truth and Justice for Humanity**